BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan dunia disebut sebagai “paru-paru” Indonesia karena merupakan salah satu negara yang memiliki hutan terbanyak. Setelah Zaire dan Brazil, hutan Indonesia merupakan hutan terluas ketiga di dunia. Diperkirakan 120,35 juta hektar, atau hampir 63% dari total luas daratan negara, ditutupi oleh hutan di Indonesia¹. Hutan ini sangat penting untuk produksi oksigen, penyerapan emisi karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Sebagai penghasil utama devisa nonmigas, pelopor pertumbuhan industri, sumber lapangan kerja, dan katalis pembangunan daerah, industri kehutanan di Indonesia mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara secara keseluruhan.².

Pengembangan sektor kehutanan ini dari waktu ke waktu menyebabkan munculnya dampak positif dan dampak negatifnya. Metode pemanfaatan dan pengolahan hutan sudah maju, dan ini merupakan hal yang baik. Di sisi lain, aktivitas manusia yang ceroboh menyebabkan kerusakan pada hutan dan krisis lahan di Indonesia. Mengingat dampak buruk ini, pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam memantau dan mengelola sumber daya alam secara efektif untuk menjamin kelestarian hutan Indonesia.

Pemerintah harus memberikan prioritas tinggi pada konservasi hutan karena kerusakan hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yan

¹Widyastuti S.M Sumardi, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, UGM Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 25.

²Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

memprihatinkan. Oleh karena itu, melindungi hutan dan kawasan hutan saat ini merupakan tugas yang sangat penting dan vital.³ Kerusakan disebabkan oleh pengelolaan yang buruk, penebangan liar, dan bahkan pembakaran lahan milik masyarakat atau hutan, serta oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan lahan dan hutan. Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi setiap tahun; namun, pada tahun 2015, puncaknya dan menimbulkan asap ekstrem di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Masyarakat memilih untuk membakar kayu guna menciptakan lahan tambahan untuk tujuan seperti perkebunan atau pertanian, sehingga menyebabkan tingginya jumlah insiden pembakaran. Masyarakat percaya bahwa pembakaran adalah pendekatan yang cepat dan murah yang memberikan hasil yang sebanding dengan teknik pembukaan lahan yang diwajibkan secara hukum. Oleh karena itu, pembakaran pun dilakukan. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan pembukaan wilayah baru, para pelaku pembakaran, baik perorangan maupun perusahaan, lebih memilih untuk membakar hutan dan lahan lainnya.

Menurunnya kesuburan tanah, perubahan suhu lokal dan global, hilangnya habitat hewan, dan kerusakan ekosistem hanyalah beberapa dampak negatif dari pembakaran hutan.⁴ Selain itu, asap dari kebakaran hutan dapat

³Zain, Alam Setia. 1996. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. hlm.41.

⁴I Putu Gede Ardhana, *Dampak Laju Deforestasi Terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati Di Indonesia*, Jurnal Metamorfosa, Universitas Udayana, Vol.3 No.2. 2016, Hlm.124. diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/metamorfosa/article/view/23674>. Pada 5 Mei 2024 Pukul 08.45 WIB.

mengganggu kesehatan penduduk setempat dengan menimbulkan berbagai penyakit bahkan kematian.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang legalitas larangan pembakaran hutan dan lahan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus dilaksanakan guna menyempurnakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan peradaban. Selain itu, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan, dan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan semuanya memuat ketentuan larangan pembakaran kayu dan lahan.

Berikut ini merupakan penjabaran perbuatan tindak pidana kahutanan yang tercantum dalam undang-undang:

Pasal 12 UU No 18 tahun 2013

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 14 Pasal 12 UU No 18 tahun 2013,

Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
 - b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.
- Pasal 15 Pasal 12 UU No 18 tahun 2013, Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 16 Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 Ayat (1) UU No 18 tahun 2013,

Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 17 Ayat (2) UU No 18 tahun 2013,

Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan di atas, pembakaran hutan dan lahan lainnya adalah tindakan ilegal berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, namun masih banyak individu dan perusahaan yang terus melakukan pembakaran jenis ini. Kemudian, hukuman pidana yang dijabarkan dalam undang-undang ini diharapkan dapat mencegah kebakaran hutan dan memberantasnya secara efektif. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk memberantas tindak pidana di masyarakat adalah dengan memberikan sanksi atau punishment terhadap pelanggarnya.⁵

Aparat penegak hukum jelas wajib menindak pelaku pembakaran hutan selain peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini demi menjaga dan menjaga kawasan hutan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan pada Pasal 1

⁵Yohana Anggita, Herry Liyus, Nys Arfa, "Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 2 No. 3, 2021, hlm.2, diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16326/13093>, Pada Tanggal 5 Mei 2024, Pukul 10.30 WIB.

Ayat (15) bahwa “sebagian pejabat kehutanan menurut sifat pekerjaannya diberi wewenang kepolisian khusus untuk menjamin penyelenggaraan kehutanan”. perlindungan." Polisi kehutanan (Polhut) merupakan satuan polisi khusus yang dimaksud dalam hal ini. Manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya berkat berkembangnya alat-alat canggih yang membantu manusia, seperti “seorang polisi dalam mengungkap suatu kejahatan”.⁶

Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

“Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”.

Sebelumnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memuat ketentuan mengenai polisi kehutanan dan menyebutkan bahwa:

“Untuk menjamin terselenggaranya Perlindungan Hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai sifat pekerjaannya memberikan wewenang kepolisian khusus kepada Polisi Kehutanan/Polhut”.

Pengelolaan keamanan hutan diperlukan karena pembentukan Polisi Kehutanan dimaksudkan untuk mengatasi kerentanan kawasan hutan terhadap

⁶Uswatun Hasanah, Yulia Monita, *Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm 141, diakses dari. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11086>, Pada 05 Mei 2024 pukul 11.00 WIB.

pelanggaran dan tindak pidana.⁷ Penciptaannya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari dan meminimalkan dampak buruk aktivitas manusia terhadap hutan, flora, dan hewan. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga hak warga dan negara atas hasil dan kawasan hutan yang lestari dan dilindungi. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan akan Polisi Kehutanan karena banyak pihak yang berupaya mengambil keuntungan ekonomi dari kawasan hutan. Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan, berikut tugas dan peranan Polisi kehutanan dalam hal ini:

- a. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Polhut terdiri dari:

- a. Polhut Pembina, khususnya, beberapa otoritas struktural yang membawahi lembaga kehutanan nasional dan regional yang, sesuai dengan tanggung jawabnya, mempunyai kekuasaan dan kendali atas pelestarian hutan;
- b. Polhut Fungsional, Yakni pegawai organisasi kehutanan pusat dan daerah yang menduduki jabatan Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan; dan
- c. Polhut Perhutani, khususnya pegawai Perusahaan Umum Perhutani yang ditunjuk sebagai Tiang Hutan oleh Direksi.

Wewenang polisi kehutanan

⁷Ridolof, Hermanus. "Kewenangan Polisi Kehutanan dalam Bidang Perlindungan Hutan pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis* 4, 5 (2016), Hlm.197 diakses dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6606>, 5 Mei 2024 Pukul 12.11 WIB.

Undang-Undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 51 Ayat (2) Pejabat yang diberikan wewenang kepolisian khusus dalam hal ini polisi kehutanan berwenang untuk:

- a. Mengadakan patrol/perondaan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya,
- b. Memberikan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya,
- c. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan,
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan,
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang,
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

UU Kehutanan memberikan kewenangan kepada Polisi Kehutanan untuk menjalankan tugasnya sebagaimana uraian di atas. Jika kita mempertimbangkan tanggung jawab dan wewenang Polisi Kehutanan dalam menangani kejadian kejahatan kehutanan di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kejahatan kehutanan harus dihentikan. Namun, dilihat dari masih tingginya kasus kejahatan kehutanan, Polisi Kehutanan belum mampu menjalankan kewenangan dan tugasnya dengan maksimal. Penyebab kurang optimalnya hal ini adalah karena jumlah Polisi Kehutanan di setiap wilayah Indonesia relatif sedikit dan tidak banyak jumlahnya.

Observasi penulis dan statistik awal menunjukkan bahwa kasus kehutanan yang ditangani oleh Kepolisian Hutan (Polhut) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi selama empat tahun terakhir.

Tabel
Data Kasus Tindak Pidana Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Tahun	Jumlah kasus	Jenis Kasus
2019	6 kasus	Illegal logging (5) Kebakaran hutan (1)
2020	3 kasus	Illegal logging (2) Perkebunan (1)
2021	1 kasus	Illegal logging (1)
2022	2 kasus	Illegal logging (2)
2023	-	-

Sumber data: Arsip Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Berdasarkan data awal yang penulis himpun dari Kepolisian Dinas Kehutanan (Polhut) Provinsi Jambi mengenai jumlah pelanggaran tindak pidana kehutanan selama lima tahun terakhir, pada tahun 2019 hanya terdapat satu tindak pidana berupa kebakaran hutan dan lahan. mencatat bahwa kebakaran hutan merupakan kejadian yang sering terjadi di Provinsi Jambi setiap tahunnya. Mengambil kesimpulan dari latar belakang di atas, maka penulis berencana melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **“Peranan Polisi kehutanan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Tindak Pidana Kehutatan Di Provinsi Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam esai ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran polisi kehutanan dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana kehutanan di Provinsi Jambi?

2. Apa kendala polisi kehutanan dalam pengendalian tindak Pidana Kehutanan di Provinsi Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran polisi kehutanan dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana kehutanan di Provinsi Jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi polisi kehutanan dalam proses pengendalian tindak pidana kehutanan di Provinsi Jambi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Temuan penelitian ini secara teoritis harus memberikan kontribusi terhadap kemajuan pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
- b. Dari segi penerapannya, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan profesional hukum untuk mengkaji bagaimana polisi kehutanan dapat membantu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan kehutanan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mencegah kerancuan atau penafsiran yang berbeda-beda terhadap makna istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian, penulis memberikan penjelasan pada setiap frasa:

1. Peranan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan peranan sebagai suatu komponen pekerjaan pokok yang harus diselesaikan. Istilah “peran” berasal dari kata “status”, dan menurut Soerjono Soekanto yang dikutip Syaron, “peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan”. Jika seseorang telah memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik, maka ia telah “memainkan perannya”.⁸

2. Polisi Kehutanan (Polhut)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 1 Angka 76 menyebutkan bahwa Polisi kehutanan adalah pejabat khusus pada instansi kehutanan pusat dan daerah yang berdasarkan tugas tugasnya merencanakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang diberi wewenang secara sah. kegiatan. diberikan yurisdiksi eksklusif polisi dalam industri kehutanan.

3. Tindak Pidana Kehutanan

Baik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maupun Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan delik kehutanan. Meskipun demikian, pengertian tersebut terkandung dalam hal berikut: “Kejahatan Kehutanan yang selanjutnya disebut Tipihut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kehutanan dan

⁸Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pem angunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4 No. 48, 2017, hlm.2, diakses dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/17575/17105>, Pada tanggal 6 Mei 2024, Pukul 10.30 WIB.

Konservasi Hayati.” Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4.Menhut-II/2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan.

E. Landasan Teoretis

Pada hakikatnya gagasan-gagasan yang mendukung pokok bahasan yang diteliti harus dijadikan sebagai landasan penelitian. Penelitian dan teori harus bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman ilmiah. Peneliti hukum tidak boleh mengevaluasi teori hanya berdasarkan fakta hukum yang diterima secara sosial, khususnya ketika melakukan penelitian hukum empiris.⁹ Teori hukum merupakan pernyataan komprehensif yang dihubungkan dengan kerangka konseptual preseden dan putusan hukum, dan kerangka ini sebagian besar menguntungkan.¹⁰ Dalam melakukan penelitian, para sarjana perlu menghubungkan antara teori dengan fakta hukum aktual yang ada di masyarakat. Dalam bagian ini, penulis menyajikan sejumlah teori yang mendukung masalah yang diteliti.

1. Teori Peranan

Terminologi mendefinisikan peran sebagai serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat. Tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu perusahaan, atau tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan, itulah yang dimaksud dengan istilah

⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 139.

¹⁰Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2011, hlm. 65. diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana>, Pada Tanggal 09 Juni 2022, Pukul 05.58 WIB.

bahasa Inggris “role”.¹¹ Gagasan ini memperjelas peran masyarakat dalam masyarakat, seperti upaya polisi kehutanan di Provinsi Jambi dalam memadamkan kebakaran lahan dan kebakaran hutan. Dalam hukum publik, peran adalah tanggung jawab atau kekuasaan yang harus dijalankan oleh pemegang jabatan. Pakar hukum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (ideal role).
2. Peranan yang seharusnya (expected role).
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role), dan
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).¹²

Selain itu, peranan menurut Bruce J.Cohen, juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Cara seseorang yang sebenarnya dalam melakukan suatu bagian disebut peran yang dilakukan.
2. Cara masyarakat mengharapkan kita melakukan tugas tertentu disebut peran yang ditentukan.
3. Seseorang yang memegang satu atau lebih status yang memiliki ekspektasi dan tujuan peran yang saling bersaing dikatakan mengalami konflik peran.
4. Eksekusi emosional suatu bagian disebut jarak peran.
5. Kegagalan tugas mengacu pada ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi tugas tertentu.
6. Seseorang yang perilakunya kita tiru, ikuti, dan teladani disebut sebagai panutan.
7. Hubungan seseorang dengan orang lain ketika menjalankan fungsinya disebut dengan rangkaian atau ruang lingkup peran (function Set).
8. ketegangan posisi adalah kelainan yang berkembang ketika seseorang merasa sulit untuk memenuhi persyaratan atau tujuan dari posisi yang dijabatnya karena tujuan yang tidak konsisten.

¹¹Eka Febrianti, “Peranan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dalam Upaya Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun”, *Skripsi*, Universitas Jambi, 2019, hlm. 27.

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketiga Belas, CV. Rajawali, Jakarta, 2008, hlm. 13.

Berdasarkan berbagai sudut pandang mengenai peran, dapat dikatakan bahwa peran terdiri dari peran yang diwujudkan dalam kenyataan dan peran yang diharapkan berdasarkan fungsinya. Oleh karena itu, hasil pelaksanaan fungsi pelaksana peran dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu peran berhasil atau tidak. Kepolisian Hutan Provinsi Jambi menjadi pelaksana peran dalam penelitian ini. Pengertian peran dalam tesis ini berkaitan dengan:

a. Peranan yang diharapkan

Peranan polisi kehutanan (Polhut) dalam melakukan penyelesaian permasalahan kebakaran hutan dan lahan seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yaitu, ialah menyiapkan, mengembangkan, melaksanakan, mengevaluasi dan memantau kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan..

b. Pemegang Peranan

Pemegang peranan penting dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana kehutanan ini ialah Polisi kehutanan (Polhut) yang telah ditunjuk oleh undang-undang.

c. Pelaksana Peranan

Pelaksana peranan utama dalam melakukan penyelesaian permasalahan kehutanan di Provinsi Jambi adalah Polisi kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

d. Objek Peranan

Para pelaku yang diduga melakukan operasi pengrusakan hutan sesuai UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjadi sasaran keterlibatan mereka dalam tindak pidana kehutanan tersebut.

2. Teori Penegakan Hukum

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan penerapan gagasan atau konsep yang disertai prakarsa untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.¹³ Penegakan hukum merupakan prosedur tunggal dan terpadu yang dimulai dengan penyelidikan polisi dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan hakim (para penjahat yang melakukan kejahatan menerima layanan lembaga pemasyarakatan).¹⁴

Penerapan hukum hanyalah salah satu aspek dari proses penegakan hukum; elemen berpengaruh tambahan termasuk:¹⁵

- a. Unsur hukum yang disebut juga dengan substansi hukum terdiri dari beberapa aspek seperti perjanjian, hukum perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin (hukum ilmiah), dan hukum adat.
- b. Kepribadian dan kesehatan mental aparat penegak hukum, yang sangat penting bagi kemampuan mereka untuk berhasil menegakkan hukum dan

¹³Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster, *PAMPAS: Journal Of Criminal* Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm. 46, diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>., Pada Tanggal 09 Juni 2022, Pukul 07.22 WIB.

¹⁴Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 43.

menjalankan sistem peradilan pidana tanpa berbohong atau bertindak munafik.

- c. Unsur prasarana dan sarana, untuk mewujudkan prosedur penegakan hukum yang profesional dengan personel, struktur, dan keadaan keuangan yang memadai.
- d. Tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta
- e. Faktor kebudayaan dan masyarakat.

M. Friedman memberikan penjelasan serupa, yang menyatakan bahwa hukum dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat jika memenuhi tiga persyaratan:¹⁶

- a. Struktur hukum (structure),
- b. Substansi hukum (substance), dan
- c. Kultur atau budaya hukum (legal culture)

Dalam karyanya, Barda Nawawi memaparkan tiga fase penegakan hukum dalam hukum pidana, diantaranya:¹⁷

- a. Badan legislatif memberlakukan undang-undang inabstaco pada tahap pembentukan, disebut juga tahap legislatif. Pada titik ini dipilih nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, baik saat ini maupun di masa depan, dan kemudian dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan yang memenuhi standar efisiensi dan keadilan.

¹⁶Djarot Indra Kurnia, et. al., *Implementasi Penyidikan terhadap Anak yang Disangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Palembang*, dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, Januari 2019, hlm. 68, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>, diakses pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 19. 30 WIB.

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2001, hlm. 70.

- b. Tahap penerapan, kadang-kadang disebut sebagai tahap peradilan, adalah ketika polisi dan pengadilan melaksanakan prosedur penegakan hukum pidana.
- c. Tahap eksekutif, yaitu tempat dilakukannya penegakan hukum secara nyata. Personel polisi yang bertugas menegakkan norma hukum dan pembatasan undang-undang dikenal sebagai petugas penegakan pidana.

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Bidang kebijakan kriminal mencakup inisiatif atau peraturan yang bertujuan untuk mencegah dan mengelola kejahatan. Kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap kebijakan peradilan, harus mempertimbangkan dan berupaya mencapai tujuan kebijakan sosial berupa “kesejahteraan sosial” dan “pertahanan sosial” karena kebijakan pencegahan kejahatan dilaksanakan melalui cara “penal” (pidana). hukum).

Baharuddin Lopa mengatakan, “upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa langkah terpadu, antara lain tindakan represif di samping tindakan preventif.”¹⁸ Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, meliputi :

1. Meningkatkan tunjangan kesejahteraan bagi individu untuk menurunkan pengangguran, yang juga akan menurunkan kejahatan.
2. Untuk menghindari anomali, tingkatkan kerangka pemantauan dan administrasi.

¹⁸ Baharuddin Lopa dan Moch.Yamin, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm. 16.

3. Meningkatkan standar pendidikan hukum untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki pengetahuan hukum.
4. Meningkatkan jumlah aparat penegak hukum dan kepolisian untuk memperkuat upaya preventif dan represif.
5. Meningkatkan profesionalisme dan ketabahan moral bagi aparat penegak hukum.¹⁹

Teknik yang bertujuan untuk mencegah kejahatan dikenal sebagai solusi preventif. Untuk mencegah kejahatan, solusi supresif adalah teknik yang sering kali mengakhiri kejahatan yang sudah dimulai atau sedang berlangsung. Ganti rugi atau imbalan bagi individu yang menderita akibat kejahatan tersebut merupakan penyelesaian yang baik. Meskipun tindakan hukum atau hukuman bermanfaat karena memberikan kompensasi kepada orang yang dirugikan setelah kejahatan tersebut berakhir, namun tetap perlu untuk mencegah kejahatan serupa terjadi lagi, baik oleh pelaku yang sama atau oleh pelaku lain.

F. Metode Penelitian

Penulis menguraikan teknik penelitian dan penulisan yang digunakan dalam skripsi ini di bawah ini agar pembaca dapat mempelajari dan memahaminya secara mendalam.

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 16-17.

2. Tipe Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah metodologi yang digunakan. Penelitian yuridis empiris menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta hukum yang telah ada dengan melakukan penelitian lapangan untuk mengamati dan memastikan pelaksanaan serta permasalahan yang berkembang.²⁰ Kajian hukum empiris ini sangat menekankan pada observasi untuk melihat bagaimana polisi kehutanan benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengatasi permasalahan kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Jambi.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif; yaitu penulis memberikan rangkuman dan penjelasan tentang bagaimana Polisi kehutanan (Polhut) melaksanakan tugasnya dalam mengatasi permasalahan karhutla dan karhutla di Provinsi Jambi serta pedoman hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang.

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber data lapangan.
- b. Data sekunder, atau informasi yang diperoleh dari sumber perpustakaan:
 - 1) Sumber hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan susunan skripsi ini, yaitu:

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 - f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan/Lahan;
 - g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan; dan
 - h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu dari berbagai bacaan ilmiah dan literatur-literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

5. Alat Pengumpul Data

Pendekatan wawancara digunakan penulis untuk mengumpulkan data. Karena penulis dapat bertemu langsung dengan responden dan mengajukan pertanyaan mengenai informasi yang sudah ada serta rekomendasi dari responden, maka pendekatan wawancara dipandang sebagai cara yang efektif untuk mengumpulkan data.²¹ Penulis awalnya memilih tiga (tiga) tanggapan resmi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang akan penulis selidiki.

6. Analisis Data

Data primer dan sekunder dikumpulkan, digabungkan, dan diproses sebelum dianalisis secara kualitatif. Temuan-temuan tersebut disajikan secara rinci, menguraikan fungsi sebenarnya polisi kehutanan dalam mengatasi permasalahan terkait kejahatan kehutanan di Provinsi Jambi.

G. Orisinalitas Penelitian

Penulis menemukan publikasi ilmiah yang masih relevan dengan penelitian ini berdasarkan temuan observasi penelitian yang dilakukan antara lain:

- 1) Supriadi (2012) “Peran Polisi Kehutanan Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai”. Persamaan objek penelitian antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peran polisi kehutanan. Selain itu, metodologi penelitiannya juga sama, yaitu penelitian yuridis empiris yang dilakukan berdasarkan fakta hukum yang ada melalui penelitian lapangan

²¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ed.1, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 57.

untuk mengamati dan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, berbeda dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai yang merupakan tempat penelitian sebelumnya dilakukan. Alhasil, hasil yang didapat niscaya akan berbeda. Selanjutnya, meskipun penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi polisi kehutanan dalam pengamanan hutan di Kabupaten Sinjai serta tantangan-tantangannya, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi peran polisi kehutanan dalam menyelesaikan kejahatan kehutanan serta tantangan yang mereka hadapi dalam menyelesaikan kejahatan kehutanan. Provinsi. Jambi.

- 2) Rudi Wawan Hertanto (2020) “Peran Polisi Kehutanan Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Kehutanan Kawasan Hutan Provinsi Lampung.” Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kemiripan karena sama-sama mengangkat topik peran Polisi Kehutanan. Data yang diperoleh pada penelitian terdahulu tentunya akan berbeda dengan penelitian kali ini dikarenakan lokasi penelitian yang berbeda. Selain itu, jika penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada peran Polisi Kehutanan dalam pemberantasan kejahatan di bidang kehutanan di kawasan hutan Provinsi Lampung, maka penelitian ini akan fokus pada peran Polisi Kehutanan dalam mengatasi permasalahan kejahatan kehutanan di Provinsi Jambi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan tepat, sambil mempertimbangkan tujuan penulisan ini, penulis memberikan struktur terorganisir sebagai berikut:

BAB PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, kelebihan dan tujuan penelitian, landasan teori, kerangka konseptual, teknik penelitian, dan sistematika penulisan semuanya dibahas dalam bab ini. Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan, memberikan tip-tip untuk melakukan penelitian dan proyek penulisan serta menyajikan permasalahan yang akan dibahas dalam Bab III.

BAB TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan ringkasan luas mengenai tanggung jawab, wewenang, dan fungsi Polisi kehutanan (Polhut) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

BAB PEMBAHASAN

Sub-bab pada bab ini memaparkan rumusan topik yang diteliti yaitu fungsi polisi kehutanan dalam mengatasi permasalahan terkait kejahatan kehutanan di Provinsi Jambi.

BAB PENUTUP

Penulis membahas permasalahan yang diangkat dalam tesis ini serta menarik kesimpulan dari keseluruhan pembicaraan dalam bab ini. Penulis

membuat beberapa rekomendasi untuk hasil perdebatan dalam skripsi ini berdasarkan kesimpulan tersebut.